



# E-PAPER PERPUSTAKAAN DPR-RI

## <http://epaper.dpr.go.id>

**Judul** : Sawit Masih Hadapi Sejumlah Persoalan  
**Tanggal** : Rabu, 12 Januari 2022  
**Surat Kabar** : Kompas  
**Halaman** : 8

K O M P A S, R A B U , 1 2 J A N U A R I 2022 hal. 8 <https://epaper.kompas.id/pdf/show/20220112> Sawit Masih Hadapi Sejumlah Persoalan Korupsi, penghindaran pajak, dan manipulasi data perdagangan masih menjadi pekerjaan rumah perbaikan tata kelola sawit. JAKARTA, KOMPAS — Tata kelola sawit di Indonesia yang masih buruk ditunjukkan dari belum tuntasnya persoalan korupsi, penghindaran pajak, serta manipulasi data perdagangan. Upaya membenahi tata kelola sawit di antaranya bisa dilakukan dengan perbaikan sistem informasi komoditas sawit yang terintegrasi dan transparan. Transparency International Indonesia mencatat produksi sawit setiap tahun juga mengalami tren peningkatan yang signifikan. Pada 2008, produksi sawit tercatat sebanyak 19,4 juta ton dan meningkat menjadi 48,3 juta ton pada 2020. Produksi ini sebagian besar untuk ekspor. "Angka ini sangat tinggi, padahal dunia masih dalam kondisi pandemi. Ambisi ini juga membuat banyak pengusaha beralih ke sawit dan mengakibatkan ekspansi masif tidak hanya dari sisi ekologis, tetapi juga sosial dan budaya," tutur peneliti Transparency International Indonesia, Bellicia Angellica, dalam diskusi, Selasa (11/1/2022). Ia mengatakan, sawit masih dililit sejumlah persoalan. Ia menyebut persoalan yang pertama adalah korupsi akibat belum ada desain tata kelola sawit yang terintegrasi antara Kementerian/lembaga terkait dengan pemerintah provinsi dan daerah setempat. Persoalan kedua berkaitan dengan penghindaran pajak. Hasil studi menunjukkan, potensi penerimaan negara rata-rata hilang sebesar Rp 22,83 triliun per tahun akibat dugaan penghindaran, penggelapan, dan manipulasi pajak oleh pengusaha yang tidak melaporkan luasan lahan kebunnya. Selain itu, kajian Sistem Pengelolaan Komoditas Kelapa Sawit oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada tahun 2016 menunjukkan tingkat kepatuhan wajib pajak badan usaha sawit turun dari 70,6 persen (2011) menjadi 42,3 persen (2015). Pada periode yang sama, tingkat kepatuhan wajib pajak perseorangan pun turun drastis dari 42,3 persen menjadi 6,3 persen. Persoalan ketiga, tata kelola sawit di Indonesia masih menghadapi manipulasi data perdagangan. Banyak pihak menyebut kelapa sawit sebagai komoditas yang terindikasi marak praktik kebocoran perdagangan melalui manipulasi pelaporan nilai ekspor. Ini berdampak pada pungutan ekspor yang diterima Pemerintah Indonesia. "Berdasarkan temuan kami, tahun 2019 nilai ekspor yang dilaporkan Indonesia sebesar 5,8 juta dollar AS, sedangkan nilai impor yang dilaporkan China 8,2 juta dollar AS. Ini kembali terulang pada 2020 ketika nilai ekspor yang dilaporkan Indonesia sebesar 1,9 juta dollar AS, sedangkan nilai impor yang dilaporkan China 2,3 juta dollar AS," ucapnya. Guna membenahi tata kelola sawit di Indonesia ini, Bellicia merekomendasikan agar pemerintah membuat kebijakan yang mengatur transparansi antarpemangku kepentingan, khususnya dalam pengawasan dan penegakan hukum terkait korupsi serta penghindaran pajak. Selain itu, perlu keterbukaan informasi kepada publik dan perbaikan sistem informasi komoditas sawit yang terintegrasi serta transparan. Direktur PT Sinar Mas Agro Resources and Technology (SMART)/Golden Agri Resources (GAR) Agus Purnomo mengatakan, dari berbagai tuduhan buruk terhadap perusahaan sawit, masih ada perusahaan yang berusaha menjalankan usahanya sesuai aturan dan lebih berkelanjutan. Kinerja perusahaan juga dapat dibuktikan melalui audit atau pemeriksaan keuangan secara rutin setiap tahun. "Setiap tahun, kebun-kebun sawit kami diperiksa lebih dari 450 audit, termasuk terkait sertifikasi dari pemerintah. Jadi, sangat bisa mewujudkan tata kelola yang baik dan adil jika perusahaan sawit memiliki niat untuk lebih berkelanjutan," katanya. Sengketa lahan Guru Besar Fakultas Kehutanan IPB University Hariadi Kartodihardjo mengatakan, permasalahan lainnya tentang tata kelola sawit adalah adanya tumpang-tindih dan sengketa lahan. Berdasarkan data Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam 5 tahun terakhir ada peningkatan 30 persen aduan berupa konflik agraria. "Seluruh rekomendasi untuk memperbaiki tata kelola sawit ini perlu sebuah alat paksa berupa jaringan atau terobosan melalui aspek tertentu. Perbaikan tata kelola sawit tidak hanya mencakup aspek teknis, tetapi juga politis," tuturnya. (MTK)